

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM ATAS *AUDIOBRANDING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Skripsi)

Oleh

**Rakha Khairan Sulthana As'ad**

Perkembangan merek non-tradisional, termasuk *audiobranding* atau merek suara, menuntut adanya kepastian hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakui suara sebagai objek perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap *audiobranding*. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap *audiobranding* sebagai merek non-tradisional serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menggambarkan pengaturan dan perlindungan hukum *audiobranding* di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *audiobranding* diberikan melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan mekanisme preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek teknis, seperti ketiadaan standar representasi suara, kesulitan pembuktian, dan minimnya yurisprudensi sebagai acuan penegakan hukum. Selain itu, upaya hukum terhadap pelanggaran *audiobranding* pada dasarnya telah tersedia melalui jalur perdata, pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, dalam praktiknya upaya hukum tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama karena kendala pembuktian teknis dan belum adanya standar yang jelas dalam menilai kesamaan merek suara.

**Kata kunci:** *Audiobranding*, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Merek dan Indikasi Geografis.

**ABSTRACT****LEGAL PROTECTION OF AUDIOBRANDING UNDER LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS**

*(Thesis)*

**By**

***Rakha Khairan Sulthana As'ad***

*The development of non-traditional trademarks, including audiobranding or sound marks, requires legal certainty within Indonesia's trademark protection system. Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications recognizes sound as a protectable trademark. However, in practice, there are still various challenges in the protection and enforcement of audiobranding. This study analyzes the legal protection of audiobranding as a non-traditional trademark and examines the legal remedies that can be pursued in cases of infringement.*

*This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary sources, which are analyzed using a qualitative juridical method to explain the regulation and protection of audiobranding in Indonesia.*

*The results show that legal protection for audiobranding is provided through a constitutive registration system with preventive and repressive mechanisms. However, its implementation remains limited due to several technical issues, including the absence of clear standards for sound representation, difficulties in proving similarity in disputes, and the lack of jurisprudence as a reference for law enforcement. In addition, legal remedies for audiobranding infringement are available through civil, criminal, and alternative dispute resolution mechanisms. Nevertheless, in practice, these remedies have not been fully effective, particularly due to technical evidentiary challenges and the absence of clear standards for assessing similarity of sound marks.*

***Keywords: Audiobranding, Intellectual Property, Legal Protection, Trademarks and Geographical Indications.***